

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian dunia membawa dampak yang cukup besar bagi perdagangan internasional. Pane (2014:11) mengemukakan perdagangan internasional adalah suatu perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain berupa barang ataupun jasa. Apabila ada perdagangan antarnegara, maka ada kegiatan ekspor dan impor. Dalam pelaksanaannya, suatu negara mempunyai tujuan tertentu terhadap kegiatan impor. Menurut Winarningsih (2012:10), tujuan kebijakan impor adalah sebagai berikut :

- a. Memagari kepentingan Nasional dari aspek K3LM (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan hidup, dan Moral bangsa);
- b. Melindungi dan meningkatkan pendapatan petani;
- c. Mendorong penggunaan produksi dalam negeri;
- d. Meningkatkan Ekspor Non Migas; dan
- e. Menciptakan perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, defnisi dari Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke Daerah Pabean. Kegiatan impor ini tidak akan terlepas dari pengenaan pajak yang akan mempengaruhi pendapatan negara. Karena salah satu sumber pemasukan bagi negara berasal dari pajak impor, khususnya PPN dan PPh Pasal 22. Pajak impor

merupakan pajak pusat, yang berarti pajak yang digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara sehingga pajak ini dipungut langsung oleh pemerintah pusat.

Barang yang masuk ke dalam daerah pabean akan dikenakan Bea Masuk serta PPN, PPh Pasal 22, dan PPnBM (Pajak Dalam Rangka Impor) kecuali yang mendapatkan fasilitas maupun keringanan. Apabila barang yang diimpor bukan termasuk barang mewah, maka dalam pajak impor tidak dikenakan PPnBM. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada pajak atas impor menganut *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Hal ini dapat digunakan sebagai tolak ukur seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dalam melaksanakan kegiatan impor, para importir harus mengikuti prosedur umum proses impor di Indonesia. Prosedur tersebut dipenuhi untuk mendapatkan izin dari Kantor Bea dan Cukai terdekat dalam melakukan kegiatan impor. Dalam hal ini, para importir diminta untuk melengkapi beberapa dokumen kepabeanan impor. Dokumen kepabeanan impor tersebut antara lain :

- a. PIB (Pemberitahuan Impor Barang), merupakan dokumen pemberitahuan kepada Bea Cukai atas kegiatan impor barang;
- b. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak), berupa bukti penerimaan negara atas kewajiban pembayaran pajak yang terutang;

Dalam pelaksanaan pembayaran antara importir dan eksportir yang telah disepakati di dalam *Sales Contract*, eksportir akan mengirimkan beberapa dokumen ke importir yang digunakan sebagai dokumen pelengkap kepabeanan. Dalam hal ini, ada juga dokumen pelengkap kepabeanan impor yang harus diurus sendiri oleh importir di dalam negeri. Beberapa dokumen pelengkap kepabeanan antara lain *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading*, dan lain sebagainya.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port) merupakan salah satu importir yang dikenakan pajak impor (PPN dan PPh Pasal 22). BJTI Port Surabaya melakukan impor barang berupa pembelian aset dan perlengkapan yang digunakan perusahaan yang bertujuan guna pemeliharaan secara berkala. Hal ini dikarenakan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port) merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pelayanan kepelabuhan domestik. Untuk menunjang kinerja pelayanan, maka BJTI Port Surabaya diharuskan menjaga kualitas aset dan perlengkapan perusahaan supaya kinerja perusahaan berjalan dengan baik dan lancar.

Sebagai importir selaku orang yang mengadakan kegiatan impor, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port) Surabaya harus mempunyai pemahaman yang baik terhadap perhitungan pajak impor (PPN dan PPh Pasal 22) dan mengetahui tata cara dalam pengadaan kegiatan impor sesuai prosedur yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terhadap pajak impor adalah Nilai Pabean ditambah dengan Bea Masuk, bukan harga jual barang dari eksportir. BJTI Port Surabaya juga harus mengetahui dan memahami tarif bea yang sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang

berlakusehingga nantinya tidak timbul pajak terutang kurang bayar atau lebih bayar di kemudian hari.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam studi lapang ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak impor (PPN dan PPh Pasal 22) pada PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemungutan Pajak Peghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Lain, dan Peraturan DJBC Nomor PER-16/BC/2016 pasal 18 tentang Perhitungan Bea Masuk, Cukai dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor).

## **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Studi lapang yang dilakukan oleh penulis diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- 1) Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan dan kepabeanan, khususnya perhitungan pajak impor (PPN dan PPh Pasal 22).
- 2) Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan studi lapang yang akan datang.
- 3) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terhadap perpajakan dan kepabeanan.

- 4) Dapat dijadikan sebagai wacana keilmuan dan sebagai acuan terhadap pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini, yaitu PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penulis agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, sehingga ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam studi lapang ini dibatasi satu perusahaan yaitu PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port) Surabaya. Dengan demikian, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada Analisis Perhitungan Pajak Impor (PPN dan PPh Pasal 22) pada PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port) Surabaya.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian Laporan Tugas Akhir yang dilakukan harus mempunyai data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan. Oleh sebab itu, penulis akan menerapkan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengamati secara langsung praktik di lapangan mengenai perhitungan pajak impor (PPN dan PPh Pasal 22) dengan maksud membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan yang sebenarnya.
- b. Dokumentasi, yaitu mengambil dokumen resmi yang terdapat di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebagai objek penelitian yang mempunyai hubungan dengan perhitungan pajak impor (PPN dan PPh Pasal 22).

- c. Wawancara, yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab secara tatap muka dengan pihak-pihak yang bersangkutan di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dalam memberikan penjelasan terkait kegiatan impor serta perhitungan pajak impor (PPN dan PPh Pasal 22) guna mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci.

